

**KONDISI PELAYANAN FASILITAS SOSIAL
KECAMATAN BANYUMANIK-SEMARANG
BERDASARKAN PERSEPSI PENDUDUK**

TUGAS AKHIR

Oleh:
ADHITA KUSUMA DWI CAHYANI
L 2D 098 402



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

ABSTRAK

Pertumbuhan permukiman di wilayah pinggiran merupakan dampak semakin padatnya aktivitas yang terjadi di pusat kota. Kecenderungan perkembangan kota yang semakin mengarah ke wilayah pinggiran ini membawa konsekuensi meningkatnya aktivitas penduduk (demand) yang membutuhkan pelayanan (supply) berupa fasilitas sebagai pendukung. Fasilitas merupakan aspek vital dalam kehidupan suatu kota, karena tanpa ketersediaan fasilitas yang cukup atau seimbang antara kebutuhan dengan pemenuhan, dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas kota, atau bahkan dapat mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri. Fasilitas menjadi sangat penting karena keberadaannya dapat mempengaruhi pembangunan kembali suatu kota dari keadaan yang terburuk (Yeates dan Garner, 1980).

Kecamatan Banyumanik yang merupakan wilayah pinggiran Kota Semarang bagian selatan memiliki fungsi utama kegiatan permukiman (RTRW Kota Semarang). Munculnya permukiman-permukiman baru menunjukkan bahwa Kecamatan Banyumanik mengalami perkembangan lahan yang mengarah pada peningkatan aktivitas perkembangan wilayah. Sebagai wilayah yang sedang berkembang, hal yang kemudian terjadi adalah munculnya permasalahan mengenai tuntutan peran dalam menyediakan fasilitas sosial yang berfungsi untuk melayani kebutuhan penduduk yang bermukim didalamnya. Karena sebagai wilayah penyangga bagi pusat kota, fungsi pelayanan fasilitas sosial pun semakin dituntut untuk memberikan kondisi pelayanan yang cukup baik bagi penduduk, sehingga dalam pemenuhannya, tanpa harus keluar dari Wilayah Banyumanik akan dapat memenuhi segala kebutuhan akan pelayanan fasilitas sosial.

Tujuan dari studi ini adalah melakukan analisis kondisi pelayanan fasilitas sosial di Kecamatan Banyumanik berdasarkan persepsi penduduk dan standar yang berlaku dalam rangka memberi rekomendasi pengembangan fasilitas sosial di wilayah Banyumanik sebagai pengembangan wilayah permukiman. Beberapa analisis yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah: analisis karakteristik penduduk, analisis ketersediaan fasilitas sosial, analisis kondisi pelayanan fasilitas sosial berdasarkan persepsi penduduk, analisis pola pemanfaatan fasilitas sosial, analisis komparasi kondisi pelayanan fasilitas sosial berdasarkan standar dengan persepsi penduduk dan yang terakhir adalah analisis arahan kebijakan terhadap perencanaan dan pengoptimalan kondisi pelayanan fasilitas sosial. Keseluruhan analisis ini dilakukan dengan metode deskriptif.

Hasil studi menunjukkan bahwa kondisi pelayanan sosial berdasar persepsi penduduk diperoleh bahwa kondisi pelayanan untuk keempat jenis fasilitas sosial (fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perbelanjaan dan niaga) telah mencukupi kebutuhan penduduk dan sesuai dengan keinginan penduduk, namun untuk fasilitas taman dan olah raga memiliki kondisi pelayanan yang kurang menurut penduduk. Berdasarkan pola pemanfaatan, sebagian besar penduduk telah memanfaatkan fasilitas yang tersedia di dalam Kecamatan Banyumanik, kecuali untuk fasilitas pendidikan yang didominasi oleh pemanfaatan di dalam dan di luar Kecamatan Banyumanik. Kelima analisis yang dilakukan memberikan masukan untuk analisis terakhir yang menghasilkan rekomendasi dalam perencanaan dan pengoptimalan kondisi pelayanan fasilitas sosial di Kecamatan Banyumanik.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik penduduk Kecamatan Banyumanik sebagian besar didominasi oleh pendapatan yang relatif rendah antara Rp. 301.000 – 600.000 sedangkan tingkat pendidikan relatif tinggi antara lulusan SLTA dan lulusan Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi tersebut dapat membangkitkan kebutuhan pelayanan fasilitas yang tinggi pula namun jika dilihat dari tingkat pendapatan yang relatif rendah maka penduduk memiliki daya beli (kemampuan membayar kompensasi) terhadap pelayanan fasilitas yang rendah. Pada sisi lain, pola pemanfaatan fasilitas didominasi oleh pemanfaatan di dalam wilayah Kecamatan Banyumanik. Jika kedua fakta tersebut dikaitkan antara karakteristik penduduk dengan pola pemanfaatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Tingkat kebutuhan pelayanan fasilitas sosial yang tinggi dengan pola pemanfaatan di dalam kawasan mengindikasikan baiknya kondisi pelayanan fasilitas sosial di dalam wilayah Kecamatan Banyumanik. Pada dasarnya pola pemanfaatan yang dominan di dalam wilayah juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang relatif rendah sehingga pengguna fasilitas tidak memiliki daya beli yang cukup untuk menggunakan fasilitas di luar wilayah yang lebih baik. Namun hal tersebut dapat disanggah dengan menggunakan dasar persepsi penduduk terhadap pelayanan fasilitas yang dominan menilai cukup terhadap pelayanan fasilitas yang ada.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perjalanan waktu, kota mengalami perkembangan sebagai akibat dari penambahan penduduk, perubahan sosio-ekonomi dan budaya serta interaksi dengan kota-kota lain di sekitarnya. Secara fisik, perkembangan suatu kota dapat dicirikan dari penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, bangunan-bangunannya yang semakin rapat dan wilayah terbangun terutama pemukiman yang cenderung semakin luas, serta semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota (Branch,1996 dalam Koestoer.dkk,2001).

Tingginya jumlah penduduk menyebabkan kota menjadi semakin padat dan intensitas aktivitas yang terjadi semakin tinggi. Fenomena perkembangan kota ini mengarah pada proses pembentukan metropolitan yang sering membawa masalah-masalah khususnya dalam perkembangan wilayah pinggiran yang terkena pengaruh perkembangan kota yang melebar sampai keluar dari batas administrasinya.

Kecenderungan perkembangan aktivitas di wilayah pinggiran yang berkelanjutan, mendorong pengembangan wilayah pinggiran ini perlu untuk diperhatikan. Wilayah yang disebut sebagai pinggiran ini merupakan wilayah yang berfungsi sebagai kawasan penyangga, yaitu untuk mendukung kehidupan di wilayah pusat. Hubungan wilayah pusat dengan wilayah pinggiran tersebut secara esensial tidak berbeda dengan hubungan daerah metropolitan dengan wilayah perbatasan (Friedmann,1979 dalam Daldjoeni,1998).

Kecenderungan perkembangan wilayah pinggiran secara fisik spasial ditunjukkan dengan munculnya permukiman baru dan adanya industri-industri baru di wilayah ini. Perkembangan ini merupakan fenomena pergeseran aktivitas kota dari wilayah pusat ke wilayah pinggiran.

Permasalahan sebagai konsekuensi dari perkembangan kota ini adalah meningkatnya aktivitas penduduk sehingga kebutuhan akan fasilitas sebagai pendukung aktivitas penduduk akan meningkat pula. Fasilitas sosial yang merupakan bagian dari fasilitas kota memegang peranan penting bagi pertumbuhan aktivitas kota.

Fasilitas merupakan aspek vital dalam kehidupan suatu kota, karena tanpa ketersediaan fasilitas yang cukup atau seimbang antara kebutuhan dengan pemenuhan,

dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas kota, atau bahkan dapat mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri. Fasilitas menjadi sangat penting karena keberadaannya dapat mempengaruhi pembangunan kembali suatu kota dari keadaan yang terburuk (Yeates dan Garner,1980). Penyediaan fasilitas sosial merupakan salah satu permasalahan perkotaan, bahkan dapat dikatakan sebagai masalah nasional.

Setiap aktivitas yang merupakan *demand* akan selalu membutuhkan pelayanan sebagai salah satu *supply*. Demikian pula aktivitas yang muncul di wilayah pinggiran tentunya membutuhkan pelayanan terhadap fasilitas sosial. Orientasi aktivitas di wilayah pinggiran ini memicu perkembangan wilayah tersebut untuk dapat mengikuti pertumbuhan kota yang selalu bertambah. Kondisi pelayanan terhadap fasilitas sosial yang dibutuhkan bagi aktivitas harus dapat dipenuhi oleh wilayah pinggiran yang tentunya sesuai dengan kapasitasnya sebagai wilayah baru yang sedang berkembang.

Terdapat dua alasan yang menyebabkan perencanaan fasilitas sosial menjadi penting dilakukan, yaitu dilihat dari perspektif penggunaan sosial dan perspektif pasar. Dilihat dari sisi perspektif penggunaan sosial, fasilitas sosial direncanakan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pelengkap kegiatan/ aktivitas masyarakat. Sedangkan dari sisi perspektif pasar, fasilitas umum direncanakan untuk meningkatkan kualitas area/ wilayah. Hal ini disadari bahwa tanpa adanya penyediaan fasilitas sosial pada suatu wilayah, maka mengakibatkan wilayah tersebut mempunyai nilai lahan yang rendah sehingga tidak menarik para investor untuk menggunakan kawasan tersebut bagi kegiatan usahanya, begitu pula sebaliknya (Chapin,1995).

Munculnya orientasi perkembangan Kota Semarang yang mengarah ke wilayah pinggiran ini mengakibatkan munculnya aktivitas-aktivitas baru. Hal ini ditandai dengan munculnya perumahan-perumahan baru yang terdapat di dalamnya. Salah satu wilayah pinggiran yang berkembang pesat di Kota Semarang adalah Kecamatan Banyumanik. Perkembangan Kecamatan Banyumanik ini dapat dilihat dengan tingginya kondisi pertumbuhan penduduk rata-rata sebesar 2,86% dibandingkan dengan kondisi pertumbuhan penduduk rata-rata Kota Semarang sebesar 1,65%.

Timbulnya perumahan-perumahan baru menunjukkan bahwa Kecamatan Banyumanik mengalami perkembangan lahan yang memperlihatkan aktivitas yang terjadi semakin bertambah. Peran fasilitas sosial terhadap keberlangsungan aktivitas permukiman menunjukkan bahwa kualitas permukiman yang baik akan berdampak pada peningkatan

kualitas kota secara keseluruhan. Ketersediaan fasilitas sosial merupakan salah satu unsur pokok bagi kelangsungan hidup masyarakat dan aktivitas permukiman tersebut.

Keterbatasan pelayanan fasilitas sosial memungkinkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan dalam aktivitas permukiman. Keterbatasan dalam penyediaannya bukan hanya akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan namun juga terhadap penghuni dan aktivitas.

Melihat besarnya pengaruh yang ditimbulkan akibat terbatasnya fasilitas sosial permukiman, maka penyediaannya perlu perencanaan yang matang. Di sisi lain, perkembangan masyarakat membawa implikasi pada penyediaan fasilitas sosial yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat sebagai pengguna harus selalu diikuti dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sosial. Kondisi pelayanan fasilitas sosial di permukiman akan berpengaruh terhadap kehidupan kota secara luas.

1.2. Rumusan Masalah

Fenomena orientasi aktivitas ke wilayah pinggiran tidak dapat dihindari lagi dan hal tersebut merupakan proses yang berjalan secara alami dari makin bertambahnya beban aktivitas di pusat kota. Hal ini akan berlangsung secara kontinyu seiring dengan perkembangan yang terjadi. Kecamatan Banyumanik yang merupakan wilayah pinggiran Kota Semarang telah menjadi satu kesatuan fungsional dengan pusat kota sehingga peranannya harus dapat mendukung aktivitas yang terdapat di pusat kota.

Fasilitas sosial sebagai salah satu bentuk pelayanan bagi aktivitas masyarakat, dapat dilihat sebagai salah satu aspek penting dalam proses perkembangan kota. Permasalahan yang muncul akan menjadi tidak terarah jika tidak diantisipasi dengan adanya arahan kebijakan pengembangan Kecamatan Banyumanik yang berfungsi sebagai wilayah penyangga bagi pusat kota. Sebagai wilayah penyangga, Banyumanik berfungsi sebagai penampung imbas dari aktivitas pusat kota yang sudah *overload*. Hal ini terlihat dengan pertumbuhan kawasan permukiman dan pengaruh dari kawasan pendidikan yang terdapat di wilayah sekitar (Kecamatan Tembalang), dimana hal ini menyebabkan penambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Pengembangan sebagai kawasan permukiman merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menuntut Banyumanik untuk dapat menyediakan kebutuhan pelayanan bagi aktivitas didalamnya yang salah satunya adalah fasilitas sosial. **Perkembangan Kecamatan Banyumanik ini memunculkan permasalahan mengenai tuntutan peran dalam menyediakan fasilitas**